

Redaksi: Ruko Mutiara Taman Palem Blok A6 No.5, Jl.Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng Timur, Jakbar Telp. (62-21) 543 50 552, 543 50 553 Fax:(62-21) 543 50 551 Email: hariannusantara@yahoo.com

Siaga Banjir, Rp20 M untuk Modifikasi Cuaca Jakarta 严防水患 雅京实施“人工驱散雨云”措施



Jakarta, Harian Nusantara- Jakarta dinyatakan berstatus siaga banjir, terhitung sejak 13 Januari hingga 12 Februari 2014. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan status itu, tertuang dalam Keputusan Nomor 70 Tahun 2014.Terkait status itu, teknologi modifikasi cuaca (TMC) pun mendapatkan anggaran.

"Biaya TMC sekitar Rp20 miliar untuk operasional pesawat terbang, bahan semai, pembuatan alat mekanisasi seeding selama dua bulan," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP) Sutopo Purwo Nugroho, lewat akun Twitter, Selasa (14/1/2014).

Sutopo mengatakan modifikasi cuaca

dilakukan mulai Selasa hingga dua bulan ke depan. Dua strategi diterapkan, yakni mempercepat hujan di daerah di luar Jakarta yang aman dari banjir dan menghambat pertumbuhan bibit hujan.Pelaksanaan modifikasi cuaca, lanjut Sutopo, akan melibatkan pesawat Hercules dan Casa 212, dengan basis di pangkalan udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dibandingkan dengan biaya yang timbul akibat banjir, ujar dia, ongkos modifikasi cuaca ini relatif kecil.

Sebagai pembanding, Sutopo menyebutkan dua kejadian banjir besar sebelumnya di Jakarta. Banjir pada 2003, sebut dia, menimbulkan kerugian tak kurang dari Rp3,8 triliun. Lalu, banjir pada Januari 2013, kata dia, memunculkan kerugian Rp7 triliun. Sutopo menginformasikan pula bahwa modifikasi cuaca ini tak punya dampak negatif pada air hujan, apalagi memunculkan kekeringan."Bahan semai yang digunakan adalah garam dapur (NaCl) yang dihaluskan hingga lebih kecil dari tepung, lalu disebarkan dari pesawat terbang," ujar dia.Bahan semai dan tenaga ahli untuk modifikasi cuaca ini, papar Sutopo, semuanya berasal dari dalam negeri.

Tenaga ahli yang dilibatkan berasal dari BNPB, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI AU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Pekerjaan Umum.Target dari modifikasi cuaca, sebut Sutopo, adalah curah hujan di Jakarta selama Januari hingga Februari 2014 turun 35 persen dari kondisi tanpa modifikasi. Upaya modifikasi cuaca serupa sebelumnya pernah dipakai saat penyelenggaraan SEA Games 2011 di Sumatera Selatan dan PON 2012 di Riau. **(KOMPAS.com)**

(罗盘网雅加达讯) 雅京专区省长佐科维通过2014年第70号决定书, 规定始于正月13日至二月12日为雅加达水灾成灾期。为此雅京专区政府特拨款200亿盾以实施“人工驱散雨云”措施。全国赈灾机构公关和资讯中心主任Sutopo Purwo Nugroho 14日指出, 这笔款是供2个月的飞机运作, 用作育苗材料的食盐等之开支。

他说, “人工驱散雨云”作业自14日启动一直持续两个月。主要的任务是加速雨点降落在不易引发水灾的雅加达以外之地区, 以及阻碍雨点的形成。他表示, 这项作业将动用以哈林机场为基地的Hercules 和Casa 212型飞机。他说, 此举的开支比起水灾的损失是相对小的。比如2003年水灾损失3.8万亿盾, 2013年则达7万亿盾。(华)



4 Orang Super Kaya Ini Masuk Partai Politik

Jakarta, Harian Nusantara- Partai politik mulai melirik orang-orang yang super kaya untuk bergabung. Tak heran, karena partai politik membutuhkan pendanaan untuk kampanye jelang pemilu.Posisi yang ditawarkan bukan hanya sekedar anggota, namun setingkat pimpinan partai.Bahkan ada yang dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dari partai tersebut.

Berikut empat orang super kaya ini masuk partai politik:

1. Hary Tanoesoedibjo, 2. Hartati Murdaya, 3. Hashim Djojohadikusumo, 4. Rusdi Kirana. **(Merdeka.com)**

(独立网雅加达讯) 目前各个政党开始争相拉拢大富豪加入他们的政党, 这是由于政党在大选前的竞选活动需要大笔资金, 故此举乃不足为奇。政党提供给他们地位, 不仅仅是党员而已, 而是党领导的职位, 甚至有的被该政党提名为总统候选人。

以下是加入政党的4大富豪:

- 1, 陈明立 (Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo), 他是民心党政客、MNC集团老板, 于2011年加入民族民主党, 曾是民族民主党全国理事会副主席和专家委员会主席。但于2013年因对该党的管理结构持有异见而退出民族民主党, 随即于同年2月跳槽至民心党, 被威兰多提名为总统候选人。他在2011年财富(福布斯)杂志的排名为印尼第22大富豪, 资产为11.9亿美元;
- 2, 邹丽英 (Hartati Murdaya), 据财富杂志的报道, 邹丽英在2008年是印尼第13位大富豪, 投入政界之前已是大企业家。当她亦民主党党员身份当选为人协议员时, 事业蒸蒸日上, 但在2012年因涉及中苏拉威西Buo1县行贿案, 而退出民主党。如今邹丽英被拘留在雅加达东区Pondok Bambu 肃贪委拘留所。据悉她将坐2年的牢狱。
- 3, 哈欣 (Hashim Djojohadi Kusumo) 为亚洲最富者之一, 资产达到8.5亿美元或等于8万5千亿盾, 是伯拉波沃的胞弟。他被钟万学委任为雅加达拉古南动物园园监督主任之后, 成了人们关注的人物, 钟万学称, 哈欣热爱动物, 能改善动物园的管理工作, 哈欣开始投入大印尼运动党的活动, 是该党辅导委员会副主席。
- 4, 鲁斯迪 (Rusdi Kirana) 因突然加入民族复兴党而成了公众的焦点人物。最初他是狮航总经理, 随后直接成为民族复兴党副主席。民族复兴党副秘书长Abdul Haramain说, 鲁斯迪具备管理民族复兴党行政的专长。他相信, 鲁斯迪的加入对2014年民族复兴党的选票会带来正面的影响, 特别是中层到上层与其有密切关系的选民。Charta Politika观察员阿利亚 (Arya Fernandez) 指出, 民族复兴党获得鲁斯利, 有利于未来竞选所需资金。(松鹤)

诸政党纷纷吸纳大富豪加盟

中央政府和地方议会不配合雅京防洪措施 Firdaus : Pemerintah Pusat dan DPRD DKI Menjegal Program Penuntasan Banjir DKI

Jakarta, Harian Nusantara- Banjir di Jakarta adalah tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau pemerintah pusat.Namun, nyatanya terjadi ketimpangan kerja.Pemerintah pusat dianggap belum optimal membantu Pemprov DKI dalam mengentaskan banjir yang terjadi rutin setiap tahun.Di sela makan siang bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, seusai blusukan ke tiga lokasi berbeda pada Senin (13/1/2014), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Manggas Rudy Siahaan malu-malu mengatakan kondisi tersebut.Ia memilih memberikan banyak contoh soal ketimpangan kerja antara pusat dan daerah.

"Di Jalan Letjend S Parman, trotoar milik pusat (Kementerian Pekerjaan Umum). Tapi di trotoar sana enggak ada mulut airnya untuk mengalirkan air ke selokan. Air kan jadi numpuk," ujarnya. Yang lebih parah, lanjut Manggas, adalah trotoar di Jalan depan Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Sepintas, trotoarnya telah memenuhi syarat karena terdapat mulut air yang dialirkan ke selokan. Namun, setelah dicek petugas Dinas PU, mulut air itu tak tersambung ke selokan dan justru tertutup oleh beton lama."Jadi seperti tipu-tipu.Pas disodok petugas saya itu ketutup beton.Ya, air di jalanan pantas tergenang terus," lanjut Manggas.

Jokowi yang sedari tadi hanya menganggut pun menyela."Itulah mengapa saya masuk ke gorong-gorong. Buat melihat ini sudah sesuai perencanaan atau belum. Kan kerja itu memang harusnya kayak gitu. Abis dikerjakan, ya dilihat hasilnya," ujarnya.Waduk Pluit ternyata wewenang pusat Jokowi menegaskan, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta.Pertama, persoalan banjir di Jakarta terkait erat dengan keberadaan 13 sungai besar yang melintas antarprovinsi.

Wewenang pengelolaan sungai-sungai itu dipegang oleh Kemen-PU. Sedangkan Jakarta, hanya sebagian pengelolaan sungai kecil, saluran penghubung, dan saluran mikro. Namun, Jokowi mengungkapkan, toh, apa bedanya? Entah sungai atau waduk di bawah wewenang siapa, Pemprov DKI Jakarta tetap bekerja dengan melaksanakan normalisasi aliran sungai."Ada tanggul jebol (Tanggul Latuharhary), kita masuk juga kok. Kayak Waduk Pluit, harusnya itu wewenang siapa? (Pemerintah pusat).Tapi siapa yang mengeruk? Kita-kita juga," ujar Jokowi."Saya enggak mau kalau kerja itu terkotak-kotak.Yang penting semua kerja cepat, fokus, dan tepat sasaran.Karena warga itu ndak mau tahu.Banjir di mana, yang dimaki ya saya," lanjut Jokowi. Mengkhianati undang-undang Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Firdaus Ali, mengungkapkan, pemerintah pusat mengkhianati Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam UU itu DKI Jakarta sebagai kota yang 100 persen memikul operasional pemerintah pusat, memiliki kekhususan pengelolaannya. "Jangan merasa karena APBD Jakarta besar, lantas dianggap kaya dan bisa kerja sendiri.Ini pengkhianatan undang-undang namanya, itu enggak boleh seperti itu," tegas Firdaus yang juga peneliti Teknik Lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) tersebut.Kebijakan Pemprov DKI yang memberikan sejumlah dana kepada Pemerintah Kota Bogor untuk membongkar vila-vila di daerah aliran sungai (DAS), lanjut Firdaus, seharusnya menjadi

sindiran nyata ke pemerintah pusat. Sebab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), sungai yang melintasi antarprovinsi di bawah kendali pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi atau kota.

Tidak hanya pemerintah pusat yang menurut Firdaus menjegal program penuntasan banjir Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI juga demikian.Sebab, hingga saat ini Rancangan APBD 2014 tak kunjung disahkan. Padahal dalam RAPBD tersebut, terdapat program minimalisasi banjir yang mesti secepatnya dilaksanakan. "Jadi teman-teman di Kebon Sirih, berhentilah tarik menarik itu APBD.Cepat sahkan.Kan program-program di APBD itu untuk rakyat juga yang nantinya akan memilih mereka," ujar Firdaus.

Melambat-lambatkan pengesahan RAPBD 2014, lanjut Firdaus, akan berimbas negatif pada hal tingkat keterpilihan para wakil rakyat tersebut, nantinya. Firdaus mengatakan, lantas apa salahnya DPRD Jakarta mempercepat pengesahan Rancangan APBD 2014 sebagai langkah untuk di satu sisi menyelamatkan Jakarta, di sisi lain juga menyelamatkan suara?Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (13/1/2014) kemarin, banjir merendam sebanyak 276 RT, 75 RW, di 31 kelurahan dan 18 kecamatan di Jakarta. Sebanyak 7.367 rumah atau 24.269 jiwa terendam banjir.Banjir juga menyebabkan sebanyak 5.152 jiwa mengungsi di 35 titik.Dua orang meninggal dunia akibat tak kuat menahan dingin. **(KOMPAS.com)**

(罗盘网雅加达讯) 解决雅加达水患问题是中央与省政府共同的责任, 但事实上诸多迹象显露, 中央并没有全方位支持省政府解决每年发生的水患难题。13日雅京专区省长佐科维穿巷走街三个地区后的午饭间歇中, 倾听雅京公共工程局局长Manggas Rudy Siahaan面带愧色的陈述。Siahaan举出诸多实例表明中央与省政府为治理水患付诸行动不均衡的现象。他称: “就如中央公共工程部管辖范围内的Letjend SParman人行道, 根本没有设置排水孔以便利水流排入河道, 一旦强降雨, 路面的水汪洋一片, 蔓延各处。还有更糟糕的是雅京西区Grogol地区Trisakti 大学一带的人行道, 虽然设置了排水孔, 但深入调查, 却发现排水道中途居然被钢筋水泥废墟堵塞, 根本没有通入河道。诸如此类的骗局甚多, 表面看工程似乎合乎规格, 事实上都是假象虚设。

一直在点头认真聆听的佐科维说: “那就是我为什么要钻进地下排水道视察的原因。举凡一项工程完成后, 不就应该如此仔细视察才对吗?” 他还强调说, 水患问题绝不是单靠省政府就能彻底解决的, 关键是雅京的水患与1 3 条贯穿各省际的大河流有着密切关系。而治理该河流是中央公共工程部的职权, 省政府的职权只能管辖小支流。但实际工作中却不然, 不管是河流还是水库, 不管是属于何人管辖的, 为了整顿治理河流, 雅京省政府全包揽做了。他说: “ Latuharhary水坝堤坝是我们动手修筑, Pluit水库不也是中央管辖的吗? 但所有挖掘工程还不都是我们干的吗? 我不想要这种划分的工作方式, 首要想到的如何集中全力, 快速地达到目标, 因为民众不想知道问题的根源所在, 一旦淹水, 被责怪的就是我。”

雅京水利资源理事会成员也是印大生态环境技能研究员Firdaus Ali 披露, 中央政府实际上已经违背了2007年第29号法令, 有关雅加达作为100% 担负中央运作的城市, 享有特殊处理待遇。他强调: “不要因为雅加达地方预算庞大, 就以为财政雄厚足以自行处理而置之不管。这是违背法令, 是很不应该的。” 他又表示, 此前雅京政府拨款给茂物市政府用于拆除河流水源地区违规建筑的别墅, 此举正好是对中央的一种嘲讽, 因为根据2004年第7号法令指明, 贯穿省际成为水利资源的河流是属于中央全权管理, 而非省政府或市政府。

不仅是中央倾轧了省政府处理水患的纲领, 雅京地方议会也百般阻挠, 2014年的开支预算至今还未予以通过, 而事实上该议案中明确指示最起码的工作纲领就是尽快解决水患问题。他接着呼吁: “ Kebonsirih的朋友们, 请别在地方预算上拉拉扯扯了, 该预算中的工作纲领不也是为拯救普选时选举你们的百姓吗? 再拖延只能破坏了你们选举的事。” (绿叶)



Jokowi Anggap Cium Tangan Mega Sebagai Kewajiban

佐科维表示吻手是尊重长者的礼仪

Jakarta, Harian Nusantara- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menganggap peristiwa dia mencium tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak perlu dibesar-besarkan.Sebab, itu merupakan bagian dari etika kesantunan anak muda kepada yang lebih senior."Kepada Ibu Mega, sebagai senior yang lebih tua dari saya, saya kira kewajiban kita untuk melakukan seperti itu," ujar Jokowi, saat ditemui di Pintu Air Karet, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.Menurut Jokowi, budaya cium tangan adalah bagian dari budaya Indonesia, pun budaya Jawa. Namun, ia mengatakan, hal itu sudah banyak dilupakan masyarakat.

Jokowi mengatakan, sikap seperti itu tidak hanya dilakukannya kepada Megawati, tetapi juga kepada orangtuanya. Dia juga pernah mencium tangan Gubernur Jawa Tengah saat itu, Bibit Waluyo, dalam acara serah terima dan pelantikan Wali Kota Surakarta.Jokowi berharap tidak ada penafsiran lain atas

momen tersebut. Ia beranggapan, banyaknya tafsiran mungkin karena banyak orang yang sudah tidak pernah melakukan budaya tersebut."Ya, karena itu enggak pernah melakukan. Modern, kebarat-baratan," ujar Jokowi seraya tertawa.Momen Jokowi mencium tangan Megawati terjadi di sela-sela HUT ke-41 PDI Perjuangan, Jumat (10/1/2014). Jokowi meminta agar hal tersebut dilihat sebagai hal yang wajar. Ia berharap sikapnya itu tidak dipandang dari perspektif politis. **(KOMPAS.com)**

(罗盘网雅加达讯) 雅京专区省长佐科维日前在斗争民主党41周年聚会上, 向美卡行吻手礼之事, 引发外界诸多猜测。他日前就此解释: “美卡是资深党主席, 又是长者, 我理应行吻手礼表示尊重她。”他还表示, 其实吻手礼是印尼民族, 也是爪哇族的民俗礼仪, 只是已被人淡忘了。不仅对美卡, 佐科维对自己的双亲惯例上也施行此礼仪。不久前, 他在向中爪省长交接Surakarta市长仪式上, 也向该省长Bibit Waluyo行吻手礼。佐科维不希望外界对此事有诸多猜测或大事渲染。他边说边笑道: “可能是少见多怪吧? 时尚, 西方化。” (绿叶)